

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Manajemen Laba

Sulistyanto (2008:7) mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut Sugiri (1998) dalam Ristie (2010) membagi definisi manajemen laba menjadi dua yaitu definisi sempit dan definisi luas. Definisi sempit, manajemen laba sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya *earnings*. Sedangkan dalam arti luas, manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Setiawati (2002) dalam Welvin dan Arleen (2010) menyatakan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer).

Fahmi (2012) menyatakan manajemen laba merupakan suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tujuan manajemen laba adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu (Agen), walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan laba yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diidentifikasi sebagai suatu keuntungan (Darwis, 2012). Manajemen laba dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan memanfaatkan pos-pos akrual yang ada di dalam laporan keuangan, yaitu dengan memanfaatkan akrual diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang digunakan untuk mengurangi atau memperbesar laba yang dilaporkan dengan cara memilih kebijakan akuntansi oleh manajemen yang bersifat subjektif (Armando dan Farahmita, 2012).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari suatu unit yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Sulistyanto (2008:7) perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba mendorong semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Secara umum ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan yaitu :

- a. Model berbasis akrual (*aggregate accruals*) merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan dan Sweeney (1995).
- b. Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mc Nichols dan Wilson (1988) Petroni (1992), Beaver dan Engel (1996), Beneish (1997), serta Beaver dan Mc Nichols (1998).

- c. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev (1997), DeGeorge, Patel, dan Zechauer (1999), serta Myer dan Skinner (1999).

Sulistyanto (2008:9) juga menyatakan bahwa sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accruals* yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini banyak digunakan oleh dunia usaha. Model akuntansi akrual dapat memunculkan komponen akun akrual yang mudah dipermainkan nominalnya, karena akun ini berasal dari transaksi-transaksi yang tidak disertai penerimaan dan pengeluaran kas. Alasan kedua, model *aggregate accruals* menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan.

Model berbasis *aggregate accruals* yang digunakan adalah *Modified Jones Model*. Model tersebut dikembangkan oleh Dechow, et.al (1995). Sama halnya model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* yang lain, model ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajerial. Model ini juga dinilai sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008:225).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan 3 pola, yaitu *income increasing*, *income decreasing*, dan *income smoothing*. *Income increasing* (Penaikan laba) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan lebih tinggi dari laba sesungguhnya. *Income decreasing* (Penurunan laba) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah dari laba sesungguhnya. Dan *income smoothing* (Perataan laba) merupakan upaya mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode (Sulistyanto, 2008:177).

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *General Accepted Accounting Prinsip* (GAAP). Analisis hasil operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang andal dan relevan. Sumber utama dari informasi ini laporan laba rugi, laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan, dan diskusi dan analisi keuangan Subramanyam dan Jhon (2008:327).

2.1.1 Faktor-faktor Manajemen Laba

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan Watt dan Zimmerman (1996) dalam Restie (2010) adalah:

1. *Bonusplan Hhypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus berdasarkan *earning* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada dibawah bogey, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada diatas cap, maka manajer juga tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada dibawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar dari pada periode barikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada diantara bogey dan cap.

2. *Debt to Equity Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* cukup tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

3. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memiliki metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut (Scott, 2000:352) dalam Meta (2010), Beberapa hal yang memotivasi seorang manajer untuk melakukan manajemen laba antara lain :

1. Alasan bonus (*bonus scheme*)

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.

2. Kontrak utang jangka panjang (*debt covenant*)

Semakin dekat perusahaan kepada kreditur, maka manajemen akan cenderung memilih prosedur yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan utang.

3. Motivasi politik (*political motivation*)

Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode dengan tingkat kemakmuran yang tinggi.

4. Motivasi pajak (*taxation motivation*)

Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pergantian CEO (*chief executive officer*)

Banyak motivasi yang muncul saat terjadi pergantian CEO. Salah satunya adalah pemaksimalan laba untuk meningkatkan bonus pada saat CEO mendekati masa pensiun.

6. IPO (*initial public offering*)

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan *go public* cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas saham yang akan dijualnya.

2.1.2 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scoot (2000) dalam Rahmawati (2007) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

2. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

5. *Offsetting extraordinary/unusual gains*

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan trend laba.

6. *Aggresive accounting applications*

Teknik yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

7. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

2.1.3 Teknik Manajemen Laba

Setiawati dan Na'im (dikutip dari Yohanes, 2011) teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba adalah melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pendapatan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, menunda atau mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak terpakai.

2.2 Tinjauan Etika Islam terhadap Spirit dan Praktik dalam Pelaksanaan Manajemen Laba (*Earnings Management*)

Spirit manajemen laba dalam pandangan teori akuntansi positif telah melandaskan konsepsinya pada utilitarianisme. Dengan spirit utilitarianisme, manajemen laba hanya memfokuskan tujuan bisnisnya kepada utilitas yang bersifat materi dan mengacuhkan utilitas yang bersifat nonmateri, begitu juga orientasi laba tersebut hanya ditujukan kepada pihak manajemen dan pemilik modal (*stockholders*) saja, sedangkan pihak *stakeholders* lainnya diacuhkan, atau

bahkan dirugikan. Spirit utilitarianisme ini sejalan dengan kapitalisme yang mengarahkan konsep *income* (laba) hanya untuk *stockholders* (Triyuwono, 2002) dalam (Mustam, 2012).

Spirit utilitarianisme ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam etika Islam. Etika Islam memandang bahwa setiap aktivitas bisnis, harus menyandarkan spiritnya kepada etika Islam. Konsepsi laba dalam bisnis Islam terbagi menjadi 2 (dua), yaitu laba materi dan laba nonmateri (Yusanto dan Widjajakusuma, 2003:6) dalam (Mustam, 2012). Orientasi laba dalam bisnis Islam juga tidak hanya ditujukan kepada *stockholders*, tetapi juga kepada *stakeholders*. Oleh karena itu, manajemen laba dalam Islam harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu:

1. Manajemen laba harus mengorientasikan tujuannya kepada utilitas yang bersifat materi sekaligus juga utilitas nonmateri. Dalam hal ini, manajemen laba tidak hanya ditujukan untuk mencari *profit* (materi) setinggi-tingginya, tetapi juga *benefit* (keuntungan atau manfaat) nonmateri, seperti kepercayaan investor, kepuasan pelanggan, keramahan lingkungan, keberkahan, citra perusahaan yang positif, dan sebagainya.
2. Manajemen laba harus mengorientasikan utilitas tersebut kepada pihak *stakeholders*. Pihak-pihak *stakeholders* ini meliputi pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*direct participants*), yaitu: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, dan pemerintah, serta pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

participants), yaitu masyarakat pada umumnya dan lingkungan sekitar (Triuwono, 2001) dalam (Mustam, 2012).

Selain harus melandaskan kepada spirit Islam, proses/teknik dalam manajemen laba juga tidak boleh bertentangan dengan etika Islam. Jika dalam pandangan teori akuntansi positif, manajemen laba dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), terutama standar akuntansi, tetapi dalam pandangan etika Islam masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Dalam hal ini terdapat dua perlakuan berbeda dalam meninjau praktik manajemen laba, yaitu:

1. Pengubahan kebijakan metode dan estimasi akuntansi dalam manajemen laba.

Pengubahan kebijakan akuntansi dalam praktik pelaporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Setiawati dan Na'im (2000) dalam (Mustam, 2012), menurut etika Islam merupakan hak subyektif bagi pihak manajemen, tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan secara bebas. Pengubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan secara konsisten (*istiqomah*) dari satu periode ke periode berikutnya, atau kalaupun dilakukan pengubahan terhadap kebijakan akuntansi, maka harus didasarkan atas pertimbangan (*judgement*) yang matang.

Menurut Zaid (2004:92) dalam (Mustam, 2012), jika suatu perusahaan melakukan pengubahan kebijakan akuntansi, maka harus diungkapkan penjelasan-penjelasan tentang latarbelakang dan dampak yang akan ditimbulkannya. Pengubahan-pengubahan semacam ini hanya dapat diterima apabila mengakibatkan perbaikan pada kualitas informasi keuangan tersebut, yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya akan menambah tingkat kemanfaatan dari informasi keuangan tersebut

2. Manajemen akrual dalam manajemen laba.

Manajemen akrual sebagaimana yang dijelaskan oleh Ayres (1994) mengenai proses perekayasaan periode pendapatan dan biaya, menurut etika Islam tidak etis dan tidak boleh dilakukan oleh manajer dalam proses pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan prinsip pelaporan yang cepat. Prinsip pelaporan yang cepat yaitu sebuah konsep pelaporan yang mengharuskan seorang akuntan untuk melaporkan setiap data transaksi sesuai dengan periode terjadinya, dan tidak ditunda-tunda ke periode berikutnya (Muhammad, 2002:62) dalam (Mustam, 2012)

Hal ini berarti bahwa manajemen laba yang melakukan perekayasaan periode akuntansi, tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip ini. Rekayasa periode pendapatan dan biaya dalam manajemen laba, umumnya dilakukan dengan cara mencatat transaksi pendapatan atau biaya periode saat ini, dicatat pada periode berikutnya, atau transaksi periode berikutnya dicatat pada periode saat ini. Hal inilah yang tidak sesuai dengan prinsip pelaporan yang cepat yang mengharuskan pencatatan setiap transaksi keuangan sesuai dengan periodenya masing-masing, tidak dipercepat, dan tidak diperlambat.

Aktivitas manajemen laba sebagai alat rekayasa laporan keuangan, di satu sisi telah memberikan dampak positif berupa utilitas (manfaat) tertentu bagi manajemen dan *stockholders*, tetapi di sisi lain juga memberikan dampak negatif terutama bagi kualitas laporan keuangan tersebut. Manajemen laba akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi kualitas laporan keuangan (Widarto, 2004:34) dalam (Mustam, 2012), yaitu kualitas andal (*reability*) dan kualitas dapat dibandingkan (*comparability*). Menurut Zaid (2004:89) dalam (Mustam, 2012), informasi keuangan akan andal selama menggambarkan realita keuangan atau kondisi keuangan secara jujur dan amanah serta tidak menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan. Sebaliknya dengan perekayasa laba melalui manajemen laba terhadap laporan keuangan akan menjadikan penyajiannya tidak jujur dan dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan.

Dalam tinjauan etika Islam, untuk menjaga kualitas andal dan dapat dibandingkan atas laporan keuangan, proses penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip *amanah* (dapat dipercaya kebenarannya). Menurut Zaid (2004:90) dalam (Mustam, 2012), prinsip amanah yang dijadikan sebagai asas dalam merealisasikan syarat andal dan dapat dibandingkan dalam penyusunan informasi keuangan menuntut adanya kelengkapan, kejujuran dan kebersihan informasi keuangan. Hal ini agar para pemakai informasi keuangan dapat mendasarkan keputusan-keputusan mereka pada informasi yang benar, hakiki dan sempurna. Jika tidak demikian, maka informasi tersebut dapat menipu para pemakai laporan keuangan karena tidak memberikan gambaran terhadap realita yang ada secara jujur.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Dari paparan diatas, Islam memandang bahwa para manajer maupun akuntan harus memiliki akhlaq/ sifat jujur, menepati amanah, dan jujur dalam melaporkan hasil dari laporan keuangan kepada para penggunanya. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam berbisnis karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

“ Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.” (QS. Al-A’raf : 85)

Islam juga tidak memperbolehkan kepada siapa saja (khususnya dalam hal ini pelaku bisnis) untuk berbuat curang/ penipuan yang mana dari perbuatan tersebut akan berdampak merugikan pihak yang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.” (QS. An Nisa : 29)

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 42:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 42)

Selain dari sifat shiddiq, amanah, tabligh, fathanah yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis diatas ciri-ciri itu masih ditambah istiqamah. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan. Dalam surat Asy- Syuara ayat 183.

2.3 Good Corporate Governance

Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu *Corporate Governance* juga berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain yakni *Corporate Governance* diharapkan akan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Lukviarman, 2016).

Menurut Widiyatmaja (2010), terdapat dua hal yang menjadi perhatian dalam *corporate governance*. Yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu, dan

yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman *Good Corporate Governance* merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik *Good Corporate Governance* kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) memaparkan azas-azas *Good Corporate Governance* sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibility (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.3.1 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *Good corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Iskander & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Siswantaya (2007) mekanisme *Good corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Mekanisme internal (internal mechanism), seperti struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksklusif.
2. Mekanisme eksternal (external mechanism), seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang.

2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam Perusahaan (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme *Good corporate governance* pada perusahaan. Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercaya dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Institusi dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional dapat melakukan monitoring dan dianggap sophisticated investors yang tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer.

Institusi dengan investasi yang substansial pada saham perusahaan memperoleh insentif yang besar untuk secara aktif memonitor dan mempengaruhi manajemen seperti mengurangi fleksibilitas manajer melakukan abnormal accounting accrual. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Schleiver dan Vishny

(1986), Coffe (1991) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam fungsi pengawasan (Siswantaya, 2007).

Siregar dan Utama (2006) menyatakan bahwa jika pengelolaan laba dilakukan dengan efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba (berhubungan positif), tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi pengelolaan laba (berhubungan negatif).

2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang di kelola (Boediono, 2005). Dalam Herawaty (2008), Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.

Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pemusatan kepentingan dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan pemilik sejajar (*aligned*) dapat mengurangi konflik keagenan. Jika konflik keagenan dapat dikurangi, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tetapi tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang besar atas kepemilikan manajerial (Siswantaya, 2007).

2.6 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak jumlah saham yang beredar dipasar semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang signifikan dalam penentuan strategi perusahaan. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier*, yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan fungsi monitoring terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan (Wardhani, 2007). Berdasarkan *The National Committee on Corporate Governance* (2000) dalam Siswantaya (2007) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan dewan komisaris. Diantaranya adalah fungsi dewan komisaris untuk mengawasi direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan direksi. Kedua, dewan komisaris berfungsi untuk memberikan saran kepada direksi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka anggota dewan komisaris merupakan seorang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-339/BEJ/07- 2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial.

2.7 Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Antonia,2008). Sesuai dengan Kep 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, yaitu dewan komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004, tugas komite audit antara lain:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
- d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil yang berkaitan dengan manajemen laba digunakan sebagai dasar acuan.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel	Hasil
1	Arya Pradipta (2011)	Analisis pengaruh dari <i>good corporate governance</i> terhadap Manajemen Laba	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 12 No.2 Agustus 2011	Variabel independen: Dewan direksi, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial Variabel dependen: Manajemen laba	(1) Kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (2) Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
2	Sugeng Pamudji dan Aprilly Trihartati (2010)	Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba	Jurnal Dinamika Akuntansi Vol.2 No.1 Maret 2010	Variabel independen: Independensi Anggota Komite Audit, Keahlian Anggota Komite Audit di Bidang Keuangan, Frekuensi pertemuan antara anggota Komite Audit, Komitmen waktu anggota Komite Audit Variabel dependen: Manajemen laba	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Independensi Anggota Komite Audit, Keahlian Anggota Komite Audit di Bidang Keuangan, Frekuensi pertemuan antara anggota Komite Audit, Komitmen waktu anggota Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
3	Indra	Pengaruh <i>corporate</i>	Jurnal	Variabel Independen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, kepemilikan struktur dan ukuran

	Kusumawardhani (2012)	<i>governance</i> , struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 9 No.1, Oktober 2012	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, laba pengelolaan Variabel dependen: Manajemen laba	perusahaan secara simultan dipengaruhi laba pengelolaan. tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional tidak parsial mempengaruhi manajemen laba, sedangkan manajerial kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
4	Dian Agustia (2013)	Pengaruh Faktor <i>Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 15 No.1 Mei 2013	Variabel independen: ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, <i>leverage, free cash flow</i> variabel dependen: manajemen laba	Hasil pengujian disimpulkan bahwa semua komponen <i>good corporate governance</i> (ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan <i>leverage, free cash flow</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba.
5	Welvin I Guna dan Harleen Herawaty (2010)	Pengaruh mekanisme <i>Good Corporate Governance, Independensi Auditor, kualitas audit dan faktor lainnya</i> terhadap manajemen laba	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.12 No.1 April 2010	Variabel independen: Auditor independen, <i>leverage</i> , kualitas audit, <i>profitabilitas</i> , ukuran perusahaan Variabel dependen: manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i> , kualitas audit, <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan Auditor independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
6	Marihot	Pengaruh <i>corporate</i>	Jurnal	Variabel independen:	Berdasarkan hasil ini kita bisa menyimpulkan

	nasution dan Doddy setiawan (2007)	<i>governance</i> terhadap manajemen laba di industri perbankan indonesia	Akuntansi Vol. 10 No.5 Juli 2007	Dewan komisaris, komite audit Variabel dependen: manajemen laba	bahwa mekanisme tata kelola perusahaan telah bekerja secara efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
7	Robert Jao dan Gagaring Pagalung (2011)	<i>Corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> Terhadap manajemen laba perusahaan Manufaktur indonesia	Jurnal Akuntansi & Auditing Vol.8 No.1 November 2011	Variabel independen: Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> Variabel dependen: Manajemen laba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola perusahaan dengan kepemilikan manajerial, Komposisi dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki signifikan pengaruh negatif pada manajemen laba, sedangkan institusi kepemilikan dan papan ukuran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba, (2) ukuran perusahaan memiliki negatif yang signifikan pengaruh pada manajemen laba, (3) pengaruh memiliki pengaruh tidak signifikan pada pendapatan pengelolaan.
8	RR. Sri handayani dan Agustono Dwi Rachadi (2009)	Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 11 No.1 April 2009	Variabel independen: Ukuran perusahaan Variabel dependen: Manajemen laba	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran sedang dan besar tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan ukuran perusahaan yang kecil baik dalam melaporkan kenaikan dan penurunan manajemen laba
9	Indra Kusumawardhani	Pengaruh <i>corporate governance</i> , struktur kepemilikan, dan	Jurnal Akuntansi dan Sistem	Variabel independen: kepemilikan institusional, kepemilikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan, kepemilikan struktur dan ukuran perusahaan secara simultan dipengaruhi laba

	(2012)	ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	Teknologi Informasi Vol. 9 No.1 Oktober 2012	manajerial, ukuran perusahaan Variabel dependen: manajemen laba	pengelolaan. Tata kelola perusahaan dan kepemilikan institusional tidak parsial mempengaruhi manajemen laba, sedangkan manajerial kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
10	Dian Agustia (2013)	Pengaruh faktor <i>Good Corporate Governance, Free Cash Flow,</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.15 No.1 Mei 2013	Variabel independen: ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional kepemilikan manajerial Variabel dependen: Manajemen laba	Hasil pengujian disimpulkan bahwa semua komponen <i>good corporate governance</i> (ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh, <i>free cash flow</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti perusahaan dengan <i>free cash flow</i> yang tinggi akan membatasi praktek manajemen laba.

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

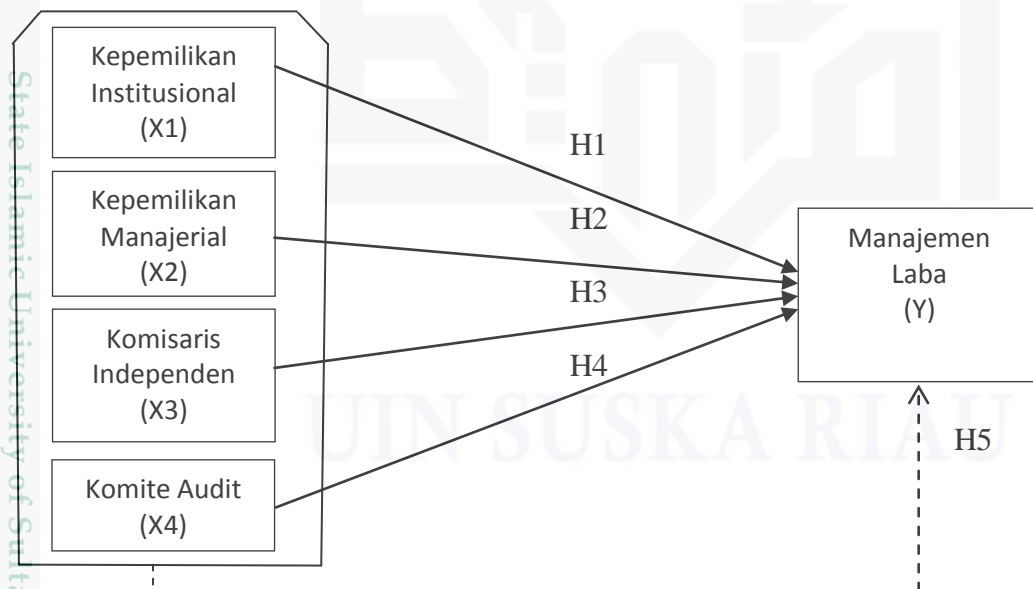
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini membahas mengenai fenomena pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba khususnya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian menyatakan adanya pengaruh mekanisme *good corporate governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkelanjutan karena hasil penelitian berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan dengan memperbarui periode penelitian. Hal ini dilakukan untuk menguji kembali tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba.

2.9 Kerangka Pemikiran

Good Corporate Governance



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penelitian Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.10 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak merumuskan hipotesis, tetapi justru menemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2013 : 93).

Berdasarkan analisis temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut:

1. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan saham kepemilikannya, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Cornett et al., (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku opportunistic para manajer. Suryani (2010) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

2. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan, maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Faisal (2004) menyatakan bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Hasil penelitian Suryani (2010) menyatakan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

3. Hubungan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain terkait. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

H3: Terdapat pengaruh antara jumlah komisaris independen terhadap manajemen laba

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hubungan Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Komite audit dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi keuangan. Anggraeni dan Basuki (2013) menemukan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih besar akan dapat menurunkan atau meminimalisir manajemen laba. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H4: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba

5. Hubungan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit simultan terhadap manajemen laba

Silmutan merupakan sesuatu yang terjadi atau dilakukan pada waktu yang bersamaan yang tidak saling menunggu (Dr. Aso Sentana : 2006). Simultan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel bebas jika digabungkan terhadap variabel terikat. dalam istilah statistik pengaruh simultan sendiri digambarkan dengan uji F. sedangkan dalam konteks hipotesis penelitian, pengaruh simultan ditunjukkan dengan hipotesis yg kurang lebih seperti ini : " variabel bebas 1 dan variabel bebas 2 secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat"